

V. KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN

A. KONSEP AGROPOLITAN

Ketimpangan pembangunan antara desa sebagai produsen pertanian dengan kota sebagai pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi telah mendorong aliran sumberdaya dari wilayah perdesaan ke kawasan perkotaan secara tidak seimbang. Salah satu upaya untuk mewujudkan kemandirian pembangunan perdesaan adalah konsep agropolitan. Agropolitan menjadi relevan diterapkan di Indonesia karena pada umumnya sektor pertanian merupakan mata pencaharian utama dari sebagian besar masyarakat perdesaan.

Agropolitan berasal dari kata 'agro' (pertanian) dan 'politan' (kota) yang dapat diartikan sebagai kota pertanian atau kota di wilayah pertanian atau pertanian di kawasan kota (Friedman dan Douglas, 1975). Lengkapnya, agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang seiring berjalannya sistem dan usaha agribisnis yang mampu melayani, mendorong, menarik, dan menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) wilayah sekitarnya (Suwandi, 2005).

Konsep pengembangan Kawasan Agropolitan bukanlah konsep baru tetapi merupakan optimalisasi hasil-hasil pembangunan pada kawasan andalan baik yang berupa kawasan Sentra Produksi (KSP), Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan kawasan prioritas tertentu lainnya. Perlu dikemukakan bahwa konsep pengembangan Kawasan Agropolitan juga menyertakan optimalisasi hasil-hasil program sejenis yang telah lebih dahulu diimplementasikan seperti: Program Bimas, Program Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN), Program Kawasan

Usaha Peternakan (KUNAK), Program Penyedia Prasarana dan Sarana Perdesaan (PPSD) dan Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Dengan demikian, program pengembangan Kawasan Agropolitan harus komplementer dan sinergis dengan berbagai program baik yang berasal dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Pengembangan Kawasan Agropolitan, secara integratif dan deferensial perlu perencanaan yang maksimal agar diperoleh efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan pembangunannya.

B. AGROPOLITAN DAN PEMBANGUNAN PERDESAAN

Pembangunan Perdesaan sebagai Basis Ketahanan Nasional (pangan, tenaga kerja, bahan baku ekspor) pola penanganannya dilaksanakan dengan pendekatan pada kekuatan kelompok tani perdesaan untuk mengembangkan sektor agribisnis yang mampu melayani, mendorong, menarik kegiatan pembangunan pertanian sektor sekitarnya serta percepatan pertumbuhan perdesaan. Terciptanya suatu kawasan agropolitan akan dapat mensejahterakan demi kemaslahatan masyarakat perdesaan yang sama dengan masyarakat perkotaan. Potensi desa perlu digali dan dikembangkan ke arah peningkatan pendapatan masyarakat.

Konsep pembangunan agropolitan, yang pertama kali diperkenalkan *Mc. Douglass* dan *Friedmann* (1974, dalam Pasaribu, 1999), sebenarnya adalah siasat untuk pengembangan perdesaan. Maksud pengembangan agropolitan adalah pembangunan dalam arti luas, seperti redistribusi tanah, kesesuaian lahan, *land reform*, mendesain tataguna lahan, pembangunan sarana dan prasarana, namun konsep ini pada utamanya bermaksud memberikan pelayanan perkotaan di kawasan perdesaan atau dengan istilah lain yang digunakan oleh *Friedmann* adalah "menciptakan kota di

perdesaan". Dengan demikian petani atau masyarakat desa tidak perlu harus pergi ke kota untuk mendapatkan pelayanan, baik dalam pelayanan yang berhubungan dengan masalah produksi dan pemasaran maupun masalah yang berhubungan dengan kebutuhan sosio-ekonomi-budaya.

Pengembangan kawasan agropolitan juga dimaksudkan agar pusat pelayanan kegiatan pertanian (agribisnis) sangat dekat dengan pemukiman petani, baik pelayanan mengenai teknik budidaya pertanian maupun pelayanan sistem kredit modal kerja dan informasi pasar. Besarnya biaya produksi dan pemasaran dapat ditekan dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses produksi dan kinerja pemasaran. Efisiensi dan efektifitas produksi dapat ditingkatkan dengan inovasi teknologi, kemudahan memperoleh modal kerja dan menyediakan fasilitas proses produksi, pemasaran serta peningkatan kemampuan sumberdaya manusia.

Inovasi teknologi yang berupa teknologi tepatguna dan modern dibutuhkan untuk kegiatan hulu-budidaya-hilir dalam sistem agribisnis tanaman-ternak-ikan-jasad renik (farming: pertanian dalam arti luas). Lembaga Penelitian Pengkajian dan Pelatihan Teknologi Farming (LP3TF) harus selalu ada di setiap kawasan, karena merupakan sebab efisien agribisnis.

Ketangguhan agribisnis suatu kawasan agropolitan membutuhkan kesinambungan penyediaan input sarana produksi (pupuk, bibit, obat-obatan, peralatan, dan lain sebagainya, sarana penunjang produksi, lembaga perbankan, koperasi, listrik dan lain sebagainya), serta sarana pemasaran (pasar, terminal angkutan, sarana transportasi, dan lain sebagainya). Setiap manajer agribisnis harus melakukan *backward linkages* dan *forward linkages* sebagai *grand strategy* menghadapi persaingan yang dinamik.

Konsep agropolitan dalam ranah wilayah terimplementasi sebagai agropolitan distrik, yaitu suatu daerah perdesaan dengan radius pelayanan 5 – 10 km dan dengan jumlah penduduk 50 – 150 ribu jiwa serta kepadatan minimal 200 jiwa/km². Jasa-jasa dan pelayanan yang disediakan disesuaikan dengan tingkat perkembangan ekonomi dan sektor budaya setempat. Agropolitan distrik perlu mempunyai otonomi yang berwujud tatanan pusat-pusat pelayanan di kawasan perdesaan yang didesain agar kinerja agribisnis efisien dan efektif. Pusat-pusat pelayanan tersebut dicirikan dengan adanya jalan-jalan usaha tani, pasar-pasar pengumpul, jalan-jalan kolektor, pasar sebagai sub terminal agribisnis, lembaga-lembaga keuangan mikro, lembaga pengkajian dan pelatihan kefarmingan, serta fasilitas dan utilitas sosial ekonomi lain pada tingkat pelayanan perdesaan.

Mengingat volume permintaan dan penawaran yang masih terbatas dan jenisnya beragam, maka pada umumnya tumbuh pasar mingguan untuk komoditi tunggal atau majemuk. Di pulau Jawa, pusat-pusat pelayanan tersebut dikenal dengan nama Pasar Pahing, Pasar Pon, Pasar Wage atau Pasar Kliwon, sedangkan di Jakarta dikenal dengan nama Pasar Minggu, Pasar Senen, Pasar Rebo, dan Pasar Jumat. Pusat-pusat tersebut berfungsi sebagai pelayanan kebutuhan produktif maupun non produktif. Pada kawasan agropolitan, pasar-pasar tradisional ditingkatkan berdasarkan prinsip efisiensi dan efektifitas. Pasar-pasar tradisional tersebut dapat dikembangkan sebagai pasar umum maupun tempat pelelangan.

Pada zaman penjajahan, fungsi utama pusat-pusat pelayanan perdesaan dikaitkan dengan kebutuhan pemerintah, perusahaan perkebunan atau pertanian dalam arti luas. Untuk itu banyak dibangun jaringan rel kereta api yang menghubungkan pusat produksi di perdesaan dengan pusat pengumpulan untuk diangkut ke

luar sektor dan diekspor ke Eropa. Pada masa itu kepentingan utamanya adalah untuk menghasilkan produk-produk yang berorientasi pada ekspor. Pusat-pusat agropolitan dan agropolitan distrik di zaman penjajahan tersebut, sekarang telah berkembang menjadi beberapa kota metropolitan. Setelah Indonesia merdeka (1945-sekarang), pusat-pusat perdesaan masih sama dengan masa sebelumnya, hanya jumlah dan jenis komoditi yang diperdagangkan mulai beragam. Fenomena agropolitan distrik di Indonesia pada zaman kemerdekaan ini masih banyak ditemukan dan perlu digerakkan atau dikembangkan dengan suatu *push* atau *pull factor*. *Push factor* yang efektif untuk mengerakkan agropolitan distrik diutamakan sarana dan prasarana umum dan agribisnis. *Pull factor* yang dianjurkan para pakar adalah pendirian pabrik agroindustri yang skala-ekonominya mampu memberikan efek stabilitas permintaan bahan baku daerah *hinterland*.

Perserikatan Bangsa Bangsa mengusulkan beberapa pedoman penting dalam pengembangan kawasan agropolitan, yaitu:

- a. Pembangunan perdesaan hanya dapat dilakukan jika konsentrasi fasilitas dan pelayanan distimulasi di pusat desa;
- b. Pengembangan berdasarkan hirarki pusat-pusat desa: *district town*, *locality town* and *village service centre* (struktur hirarki yang berhubungan dengan norma dan standar pelayanan merupakan kerangka kerja perencanaan);
- c. Perencanaan dilakukan pada tingkat regional (pada perluasannya dapat dibagi sebagai sub-sub regional; *delienasi region* dapat berbentuk batas geografis, batas administratif atau batas kegiatan ekonomi/batas fungsional modal);
- d. Perencanaan pembangunan dan pengembangan desa mulai dari tingkat nasional-provinsi-kabupaten-kecamatan dan kawasan).

Pengembangan kawasan agropolitan bukanlah konsep baru tetapi merupakan kelanjutan untuk mengoptimalkan hasil-hasil pembangunan pada kawasan andalan yang sudah dikembangkan sebelumnya. Dengan demikian program pengembangan kawasan yang akan dikembangkan adalah untuk mensinergikan berbagai program baik yang berasal dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota pada kawasan andalan yang ditetapkan daerah. Dalam rangka pengembangan agropolitan secara terintegrasi, perlu disusun *master plan* pengembangan kawasan agropolitan yang akan menjadi acuan penyusunan program pengembangan. Adapun muatan-muatan yang terkandung di dalamnya diantaranya:

- a. Penetapan pusat agropolitan yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan transportasi pertanian (*agriculture-trade/transport-centre*), penyedia jasa pendukung pertanian (*agriculture support service*), pasar konsumen produk pertanian (*non agriculture consumers market*), pusat industri pertanian (*agro based industry*), penyedia pekerjaan non pertanian (*non agricultural employment*) dan pusat agropolitan serta *hinterland*-nya terkait dengan sistem permukiman nasional, provinsi dan kabupaten;
- b. Penetapan unit-unit kawasan pengembangan yang berfungsi sebagai pusat produksi pertanian (*agriculture production*), intensifikasi pertanian (*agricultural intensification*), pusat pendapatan perdesaan dan permintaan untuk barang-barang dan jasa non pertanian (*rural income and demand to agriculture goods and service*) dan produksi tanaman siap jual dan diversifikasi pertanian (*cash crop production and agricultural diversification*);
- c. Penetapan sektor unggulan, yaitu merupakan sektor unggulan yang sudah berkembang dan didukung oleh sektor hilirnya,

kegiatan agribisnis yang banyak melibatkan pelaku dan masyarakat yang paling besar dan mempunyai skala ekonomi yang memungkinkan untuk dikembangkan dengan orientasi ekspor;

- d. Dukungan infrastruktur yang berbentuk struktur ruang yang mendukung pengembangan kawasan agropolitan diantaranya jaringan jalan, irigasi, sumber-sumber air dan jaringan utilitas (listrik dan telekomunikasi);
- e. Dukungan sistem kelembagaan, yaitu dukungan kelembagaan pengelola pengembangan kawasan agropolitan merupakan bagian dari pemerintah daerah dengan fasilitas pemerintah pusat dan pengembangan sistem kelembagaan insentif dan disinsentif pengembangan kawasan agropolitan. Melalui keterkaitan tersebut, pusat agropolitan dan kawasan perdesaan berinteraksi satu sama lainnya saling menguntungkan. Dengan adanya pola interaksi ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah (*value added*) produksi kawasan agropolitan sehingga pembangunan perdesaan dapat dipacu dan migrasi desa kota yang terjadi dapat dikendalikan.

C. Peran Agribisnis Dalam Pengembangan Agropolitan

Pengembangan Kawasan Agropolitan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan desa dan peningkatan keterkaitan desa-kota. Pengembangan Kawasan Agropolitan diharapkan mampu menjadi pendorong (*push factor*) dan penarik (*pull factor*) berkembangnya agribisnis yang berdaya saing tinggi, berbasis kerakyatan, berkelanjutan serta terdesentralisasi (wewenang berada di Pemerintah Daerah dan Masyarakat). Berkembangnya agribisnis

di kawasan agropolitan tersebut, baik dalam lingkup budidaya (*on farm*) maupun pada lingkup hulu (pengadaan sarana produksi pertanian) dan hilir (pasca panen/pengolahan produk primer dan pemasaran).

Pola agribisnis (pandangan manajerial *backward-forward*) diharapkan dapat mengasah atau merubah pola pikir petani dari *subsistence managerial* menuju *commercial managerial* sehingga dikelak kemudian hari tercipta entrepreneur-entrepreneur yang memiliki *self confidence*. Secara tidak langsung kemandirian petani akan mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat desa dengan kota, mengurangi kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya, mencegah terjadinya urbanisasi tenaga produktif dan gatra positif lainnya. Pada akhirnya sebagai salah satu gerakan dan elemen pembangunan, maka pengembangan Kawasan Agropolitan diharapkan menjadi pendukung dalam memperoleh *platform* daya saing daerah sehingga mampu meningkatkan investasi dan akhirnya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tujuan pengembangan kawasan agropolitan adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dengan kota (Deptan, 2002). Wujudnya yaitu dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan (tidak merusak lingkungan), dan terdesentralisasi (wewenang berada pada pemerintah daerah dan masyarakat).

Sistem agribisnis adalah usaha tani yang dilakukan secara terpadu, tidak saja dalam usaha budidaya (*on farm*) tetapi juga meliputi usaha penyediaan sarana pertanian, *processing* dan pemasaran hasil pertanian serta jasa pendukungnya. Inti desain agropolitan adalah struktur tata ruang beserta prasarana dan sarana

dasar yang tergayut dengan kegiatan agribisnis sebagai suatu sistem. Program pengembangan kawasan agropolitan adalah pembangunan ekonomi berbasis pertanian di perdesaan, yang dirancang dan dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada untuk mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi. Pengembangan kawasan agropolitan dirancang secara *bottom up* difasilitasi oleh pemerintah.

D. Agropolitan dan Pusat-Pusat Perkembangan

1. Sistem Pusat Desa

Secara harafiah, **agropolitan** berasal dari kata **agro** (pertanian) dan **politan/polis** (kota), sehingga pengembangan agropolitan mengandung pengertian: pengembangan suatu kawasan tertentu yang berbasis kegiatan pertanian dalam arti luas. Kawasan agropolitan didesain agar dapat melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian dalam arti luas pada desa-desa sekitarnya. Komponen dasar kawasan agropolitan adalah kota tani dan daerah sentra produksi pertanian. Kawasan agropolitan dapat terdiri dari komponen dasar tunggal atau majemuk, dengan batasan yang tidak ditentukan oleh batas administrasi pemerintah, tetapi lebih ditentukan oleh skala ekonomi agribisnis, dengan pusat perkembangan adalah 'kota tani'.

Kota tani sebagai suatu pusat desa merupakan daerah pelayanan agribisnis dalam lingkup *hinterland*-nya. Kota tani merupakan pusat desa yang berada di pinggiran kota (*perpherial city*). Kota tani dapat didesain dengan basis suatu kota nagari, kota kecamatan atau sebuah kelurahan di perdesaan yang

memiliki peran sebagai pusat dari desa-desa lain disekitarnya. Dalam penetapan kota tani sebagai suatu sistem pusat desa digunakan kriteria-kriteria yang bertumpu pada ketersediaan sarana prasarana serta eksisting kegiatan agribisnis. Sistem pusat desa menggunakan standar yang beragam. Setiap pusat perdesaan mencakup suatu radius area pelayanan. Hirarki sistem pusat perdesaan meliputi pusat desa dan kota. Standar dan norma dalam sistem hirarki pusat-pusat pengembangan perdesaan juga didasarkan populasi penduduk.

2. Interelasi Pusat Desa Berdasarkan Prinsip Pemasaran Agropolitan

Cristaller mengusulkan model pusat desa dan hirarkinya berdasarkan prinsip pemasaran. Rentang area pasar diukur dari jumlah penduduk dan cakupan teritorialnya. Penerapan prinsip pemasaran dengan pola spasial yang memungkinkan efisiensi dan efektifitas distribusi barang dan jasa dengan sesedikit mungkin membentuk pusat kegiatan. Cristaller juga membangun model pusat desa berdasarkan prinsip transportasi dimana pada model ini pergerakan barang dan jasa dimaksimalkan dan biayanya diminimumkan.

Secara horizontal, model Cristaller menunjukkan kegiatan-kegiatan manusia yang terorganisir dalam tata ruang geografis. Tempat-tempat sentral (pusat-pusat) yang lebih tinggi ordenya mempunyai wilayah perdagangan atau wilayah pelayanan yang lebih luas. Tempat-tempat sentral kecil dan wilayah-wilayah komplementernya tercakup dalam wilayah-wilayah perdagangan dari pusat-pusat yang lebih besar. Secara vertikal, model Cristaller memperlihatkan bahwa pusat-pusat yang lebih tinggi ordenya mensuplai barang-barang dan jasa-jasa ke seluruh wilayah. Pusat-pusat yang lebih tinggi ordenya mempunyai

jumlah dan jenis kegiatan serta volume perdagangan yang lebih besar daripada pusat-pusat yang lebih rendah ordenya. Jika hirarki pusat-pusat tersebut sudah terbentuk maka dominasi pusat-pusat yang lebih besar dan mengutupnya arus gejala ekonomi akan mencerminkan ciri-ciri suatu wilayah atau model transportasi kawasan agropolitan.

Secara fenomenal, hierarki pasar yang terbentuk dalam sistem kawasan agropolitan terdiri dari pasar pengumpul di *hinterland*, pasar pelayanan internal di kota tani dan pasar pelayanan eksternal di kota tani utama. Letak atau lokasi sarana dan prasarana pasar di kawasan agropolitan tergantung dari volume barang dan model pengembangannya. Besarnya volume barang yang diperdagangkan pada suatu daerah *hinterland* kecuali membutuhkan pasar pengumpul juga membutuhkan tempat atau ruang penyimpanan serta membutuhkan sarana pengawetan seperti *cooler* atau *dryer*. Pada kondisi atau kasus tersebut pelayanan pasar pada suatu kota tani lebih pada kebutuhan sistem agribisnis hulu (jasa agribisnis) sedangkan sub terminal agribisnis (STA) dapat dialokasikan mendekati *hinterland*. Pada daerah dengan topografi atau kelerengan curam STA lebih difungsikan untuk pengumpulan dan penyimpanan sementara, sedangkan proses pengawetan dan distribusi sebaiknya dilakukan didaerah yang dinilai menguntungkan yaitu di daerah ujung sirkum pelayanan kota tani.

3. Perkembangan dan Pertumbuhan Pusat Desa Agribisnis

Desa tempat terpusatnya sejumlah penduduk dengan kegiatan agribisnis merupakan suatu *organism* yang berkembang dan tumbuh. Perkembangan dan pertumbuhan Pusat Desa Agribisnis (PDA) dapat berkembang dengan sendirinya secara alamiah. Suatu perkembangan dan pertumbuhan PDA, perlu perencanaan

tata ruang fisiknya sehingga mampu memperkecil permasalahan baru yang akan timbul. Dalam hal ini maka perencanaan PDA perlu memiliki arah dan pertimbangan mengenai:

- a. Hubungan antar desa (intra regional);
- b. Hubungan antar wilayah (inter regional);
- c. Penempatan desa dalam kaitannya dengan strategi pengembangan wilayah;
- d. Pemikiran hirarki desa-desa sesuai dengan fungsi dan peranannya sebagai pusat pengembangan dari suatu wilayah ekonomi;
- e. Pemikiran lokasi desa yang dihubungkan dengan usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup.

Secara teoritis rencana PDA sebagai komponen Sistem Kawasan Agropolitan perlu memperlihatkan struktur tata ruang yang menata hirarki PDA aksesibilitas, mekanisme pemasaran serta ekosistem. Secara teknis perencanaan PDA sebagai komponen Sistem Kawasan Agropolitan ditekankan pada:

- a. Kecenderungan perkembangan kebutuhan PDA mengenai tata ruang di masa mendatang;
- b. Jarak capai pada setiap PDA sebagai sistem Kawasan Agropolitan;
- c. Ketelitian dan ketepatan desain tata ruang dan tata guna tanah;
- d. Jaringan infrastruktur untuk pergerakan agribisnis baik lokal maupun regional.

Perkembangan dan pertumbuhan fisik desa merupakan konsekuensi nyata dari perkembangan tuntutan akan kebutuhan terhadap ruangan. Tata ruang fisik desa pada hakekatnya merupakan implikasi dari perkembangan dan pertumbuhan

kebutuhan komponen utama masyarakat yaitu wisma, marga, suka, karya, dan penyempurna.

4. Desa Pusat Pertumbuhan Agribisnis

Daerah Pusat Pertumbuhan Agribisnis (DPPA) secara konseptual merupakan Daerah Pusat Pertumbuhan (DPP) dengan kegiatan ekonomi utama agribisnis. Secara teknis perencanaan tata ruang agropolitan DPPA ini merupakan kota tani dan kota tani utama. Kawasan Terpilih Pusat Pertumbuhan Desa (KTP2D) dengan kegiatan ekonomi utama agribisnis. KTP2KD merupakan kawasan yang mencakup DPPA dan *hinterland*-nya. Secara teknis praktis, penetapan kota tani dan kota tani utama dapat menunjuk suatu dusun, desa, kecamatan, kabupaten maupun ibukota provinsi. Namun demikian khususnya di Jawa berdasarkan ratifikasi demografi, infrastruktur-suprastruktur, dan ketersediaan data dianjurkan agar penetapan kota tani atau kota tani utama menunjuk suatu desa atau ibukota kecamatan. Unsur pembentuk ruang KTP2DA adalah *hinterland* dan kota tani atau kota tani utama. Khususnya di Jawa dan Madura, *hinterland* suatu kota tani sebaiknya merupakan kelompok desa atau dusun. Untuk mempermudah identifikasi *hinterland* maka desa-desa atau dusun-dusun dalam sirkum 5 km dari kota tani serta secara akses dan pasar tergantung pada kota tani tersebut ditetapkan sebagai KTP2DA. *Hinterland* tersebut secara eksisting maupun perencanaan terdiri dari beberapa sentra produksi komoditas tunggal.

5. Agropolitan Sebagai Lokasi Agribisnis

Selama kurang lebih satu abad, para ekonom, pakar geografi, perencana kota, pakar bisnis, pakar perencanaan regional dan ilmuwan sosial lainnya mencoba menjelaskan mengapa dan

dimana suatu aktifitas ekonomi berlokasi (Krugman,1991; Kuncoro,2000; O, Sullivan, 1996; Porter, 1998). Di Indonesia studi yang komprehensif mengenai konsentrasi ekonomi secara geografis (spasial) masih sangat langka. Oleh karena agroindustri merupakan subsistem penggerak agribisnis, maka data aglomerasi agribisnis sebaiknya diambil dari kegiatan sub sektor hilir atau *down stream* (agroindustri).

Menjawab pertanyaan atau menjelaskan dimana penyebaran kawasan agribisnis/agroindustri di suatu kabupaten/kota dapat memanfaatkan/menggunakan sistem informasi Geografis (GIS) yang menampilkan data agribisnis/agroindustri pada tingkat kecamatan. Namun demikian apabila pembuatan GIS tidak memungkinkan karena biaya, maka analisis perwilayahan komoditas perkecamatan dapat dikuantifikasi dengan formulasi *Location Quotient* dapat digunakan untuk penetapan komoditas unggulan.

6. Komoditas Unggulan

Identifikasi calon kawasan agropolitan di suatu daerah dapat dilakukan melalui identifikasi komoditas unggulan, pemanfaatan lahan, kebutuhan sarana dan prasarana dan struktur tata ruangnya. Sistem pengembangan Usaha Tani Berbasis Komoditas disajikan alur sistem pengembangan usaha tani berbasis komoditas. Sistem sosial ekonomi dan agroekosistem setempat didukung oleh sumber daya alam dan informasi pasar akan mendorong terwujudnya usaha tani dan usaha terkait lainnya yang tangguh. Usaha tani agrokomplek/farming/pertanian dalam arti luas bersama-sama dengan sumber daya alam dikelola dengan konsep “ngulir budi ngesti bumi” sehingga bertanggungjawab terhadap terjaganya kelestarian sumberdaya alam.

Tahapan pengembangan usaha tani berbasis komoditas dilakukan melalui identifikasi komoditas unggulan, kawasan dan sektor menghasilkan daerah pusat pertumbuhan agribisnis dan kawasan terpilih pusat pengembangan desa agribisnis (DPPA dan KTP2DA). Desa Pusat Pertumbuhan Agribisnis apabila didukung dengan permodalan, teknologi dan assistensi akan memiliki daya saing yang tinggi, apalagi dilengkapi dengan kondusifitas kawasan. Penetapan komoditi unggulan yang digunakan untuk penetapan lokasi kawasan agropolitan memiliki arti:

- a. Arahan Penetapan Spasial Lokasi Agropolitan;
- b. Arahan Penetapan *Positioning* Pemasaran Produk-produk pertanian daerah terkait;
- c. Arahan penetapan bahan baku untuk agroindustri sebagai penggerak agribisnis daerah terkait.

Penetapan komoditas unggulan pada kawasan agropolitan sebaiknya diikuti dengan penetapan komoditas-komoditas lain agar diversifikasi produk daerah memiliki ragam sesuai dengan dinamika pasar. Pada kontek agribisnis, sesuai dengan perkembangan dan dinamika pasar maka konsep komoditas unggulan tidak berlaku. Petani atau pelaku agribisnis cenderung mengusahakan komoditas yang diminta oleh pasar. Pada kontek pengembangan agribisnis kawasan, komoditas yang diusahakan petani diarahkan pada komoditas yang memiliki peluang untuk ditingkatkan nilai tambahnya. Produk unggulan kawasan agropolitan yang ideal adalah produk unggulan yang berupa hasil pertanian yang telah diolah dalam kegiatan *home industry/agroindustri*. Secara konseptual strategi pengembangan

agribisnis dalam kawasan agropolitan adalah pola agribisnis terintegrasi vertikal dan produk terdiversifikasi vertikal.

Pada lingkup nasional kriteria komoditas unggulan diarahkan untuk ketahanan pangan dan merubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Komoditas unggulan nasional diharapkan memenuhi beberapa kriteria dibawah ini:

- a. Mempunyai tingkat kesesuaian agroekologi yang tinggi;
- b. Mempunyai pasar yang jelas;
- c. Mempunyai kemampuan yang tinggi dalam menciptakan nilai tambah;
- d. Mempunyai kemampuan dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat berpendapatan rendah;
- e. Mempunyai dukungan kebijakan pemerintah dalam bidang-bidang teknologi, prasarana, sarana, kelembagaan, permodalan dan infrastruktur lain dalam arti luas;
- f. Merupakan komoditas yang telah diusahakan oleh masyarakat setempat;
- g. Mempunyai kelayakan untuk diusahakan baik secara finansial maupun ekonomi.

Pada lingkup Kabupaten Kota kriteria penetapan komoditas unggulan mengacu kriteria komoditas unggulan nasional. Pada tingkat kabupaten komoditas basis dibedakan menjadi komoditas unggulan, andalan dan potensial. Komoditas unggulan adalah komoditi tanaman/ternak/ikan yang sesuai agroekologi, dimana omzet relatif tinggi, peluang pasar baik dan dapat digunakan sebagai alat "*positioning*" atau "*trademark*" dalam pemasaran. Komoditas unggulan diarahkan pada komoditi yang dapat ditingkatkan skala ekonominya hingga bermakna serta layak - untuk ditingkatkan nilai tambahnya dalam

agroindustri. Komoditas unggulan kabupaten diharapkan memenuhi beberapa kriteria di bawah ini:

- a. Mengacu kriteria komoditas unggulan nasional;
- b. Memiliki arti ekonomi yang tinggi di Kabupaten;
- c. Mencukupi untuk kebutuhan sendiri dan mampu mensuplai daerah lain atau ekspor;
- d. Memiliki pasar yang *prospectus*;
- e. Merupakan komoditas unik berdaya saing tinggi;
- f. Memiliki potensi untuk ditingkatkan nilai tambahnya dalam agroindustri;
- g. Merupakan komoditas bernilai ekonomi tinggi;
- h. Dapat dibudidayakan secara meluas di Kabupaten

Keterangan: komoditas unggulan dinamik dan perlu diversifikasi.

7. Sistem Pasar Agropolitan

Sistem pasar pada kawasan agropolitan terdiri dari komponen pasar pengumpul yang terletak di desa-desa *hinterland*, pasar kota tani yang merupakan tempat transaksi internal dan kegiatan jasa pemasaran, pasar kota tani utama merupakan tempat transaksi eksternal dan kegiatan jasa pemasaran, pasar kota tani utama merupakan tempat transaksi eksternal dan kegiatan jasa pemasaran. Garis besar strategi pemasaran Kawasan Agropolitan (KA) terdiri dari tiga langkah :

- a. Menjadi tuan rumah yang baik (*be a good host*) bagi target market kawasan;
- b. Memperlakukan mereka secara memadai (*treath your guest properly*);
- c. Membangun rumah yang nyaman bagi pelanggan (*building a home sweet home*).

Secara rinci Konsep Pemasaran Kawasan Agropolitan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, untuk menjadi tuan rumah yang baik maka harus terjadi kolaborasi kohesif antar masyarakat (*community*), kalangan bisnis wira usahawan (*entrepreneur*), dan pemerintah daerah (*government*). Tiga pelaku utama kawasan ini harus mampu saling mengedukasi agar mereka menjadi *knowledgeable* dan terus menyamakan persepsi dan gerak langkah menarik TTI (*traders, tourists, investors*)/TDO (*talens, developers, organizers*) dalam rangka mendongkrak produktivitas kawasan dan akhirnya standar hidup masyarakat. Kolaborasi kohesif ini dibutuhkan agar aktivitas masyarakat, operasional bisnis, dan kebijakan pemerintah daerah selaras dan saling menunjang sehingga terbentuk iklim yang baik yang mampu menarik TTI/TDO.

Dari sisi aktivitas masyarakat, tiga pelaku utama diatas harus mendorong agar semua lapisan masyarakat (termasuk LSM dan DPRD) bersikap *welcome* terhadap kedatangan TTI/TDO dan sumber daya dari luar. Dari sisi operasional bisnis mereka harus terus menerus membangun iklim bisnis yang baik dan menjamin semakin meningkatnya peluang investasi di kawasan. Kalangan bisnis haruslah secara kontinyu membangun kompetensinya, agar proses produktivitas bisnis yang berkembang terus meningkat dan pada gilirannya proses produktivitas perekonomian naik.

Salah satu aspek penting dalam operasional adalah terbentuknya jaringan agribisnis di kawasan dengan jaringan agribisnis nasional/global, sehingga kawasan akan memiliki akses pada sumber daya global dan mampu menangkap peluang-peluang pasar modal. Dari sisi kebijakan pemerintah daerah perlu dikeluarkan regulasi atau perda yang mendukung

kondusifnya iklim bisnis dan investasi. Pungutan pajak yang berorientasi untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tidak boleh sewenang-wenang, berorientasi jangka pendek yang akan memberikan pengaruh terhadap berkurangnya TTI/TDO.

Kedua, memberlakukan TTI/TDO secara semestinya berarti kawasan mampu mengidentifikasi harapan masyarakat secara responsif dan memuaskan masyarakat untuk kemudian dapat beraktifitas secara baik. Untuk dapat melakukannya, maka pemerintah daerah harus memperbaiki *live ability*, *investability*, dan *visitability*.

Ketiga, untuk membangun rumah yang nyaman bagi TTI/TDO maka daerah harus menyediakan wahana yang memadahi aktivitas mereka. Agar turis/pembeli merasa berada di rumah sendiri maka kawasan harus menyediakan atraksi yang menarik, akses yang aman, building yang nyaman, serta kompetitif dengan pesaing. Untuk menarik sumberdaya manusia yang baik dari luar daerah, pemerintah daerah harus mengembangkan perguruan tinggi atau politeknik bahkan sekolah menengah agribisnis dan agroindustri yang kecuali akan berguna memenuhi kebutuhan daerah juga berdaya tarik tinggi bagi daerah sekitarnya. Melengkapi tiga langkah strategis di atas, maka daerah perlu merubah pendekatan birokratis menjadi pendekatan *intreprenuerial*; budaya *intreprenuerial*; serta perumusan *positioning*. *Positioning* adalah upaya membangun suatu kesan positif tertentu diantaranya ada yang sudah terkenal, sementara produk yang lain belum banyak peminatnya. Juga terdapat beberapa produk dan daerah tujuan wisata yang memiliki potensi untuk dikembangkan pada waktu yang akan datang. Namun demikian beberapa produk unggulan diketahui tidak didukung oleh agroklimatnya, sehingga tidak perlu

dikembangkan bahkan pada masa-masa mendatang perlu ditinggalkan. Dalam praktek tidak mungkin kita memberikan perhatian dalam bentuk modal, promosi atau pengembangan yang sama terhadap produk agribisnis dan agrowisata di KA. Agar KA dapat melakukan prioritas pengembangan produk unggulan, maka KA perlu secara berkala menetapkan portofolio dari pengalokasian produk KA.

Dalam menentukan strategi mana yang akan dipilih dan mana yang lebih cocok maka KA dapat melakukannya dalam dua tahap:

Pertama, KA dapat mengembangkan suatu strategi portopolio produk, artinya terhadap produk yang sementara ada (eksisting) akan dikembangkan atau tidak, apakah produk tertentu akan dikembangkan terus dan apakah produk tertentu lainnya akan ditinggalkan karena tidak sesuai dengan agroklimat dan agroekonominya.

Kedua, KA bisa mengembangkan suatu strategi perluasan pasar dengan memutuskan berkonsentrasi pada pasar baru yang akan dijadikan sasaran (target market) di waktu mendatang.

E. Ciri-Ciri Dan Persyaratan Pengembangan Kawasan

Agropolitan

1. Ciri-ciri Kawasan Agropolitan

Ciri-ciri kawasan agropolitan menurut Badan pengembangan SDM pertanian Departemen Pertanian, 2003 adalah sebagian besar masyarakat di kawasan tersebut didominasi oleh kegiatan pertanian atau agribisnis, adanya keterkaitan antar kota dengan desa yang bersifat interdependensi dan suasana kehidupan masyarakat di kawasan agropolitan yang mirip dengan suasana di perkotaan, memiliki kelembagaan dan prasarana/sarana agribisnis, seperti:

- a. Sebagian besar masyarakat di kawasan bermata pencaharian dalam agribisnis;
- b. Sebagian besar kegiatan di kawasan tersebut didominasi agribisnis termasuk agroindustri;
- c. Hubungan antara kota tani dan *hinterlandnya* bersifat interdependensi;
- d. Kawasan *hinterland* merupakan kawasan budidaya (*on farm*), dimana terdapat pasar pengumpul;
- e. Kota tani merupakan kawasan penyediaan sarana pertanian, modal, teknologi, informasi pengolahan hasil dan penampungan (pemasaran) hasil produksi *hinterland*;
- f. Kehidupan masyarakat di kawasan agropolitan memiliki fasilitas kota pada umumnya, namun tetap bernuansa desa;
- g. Lembaga agribisnis di kawasan *hinterland* terintegrasi secara vertikal dengan lembaga agribisnis di Kota tani maupun kota tani utama;

- h. Kawasan agropolitan memiliki lembaga pengembangan agribisnis secara mandiri dan terpusat di kota tani;
- i. Menjamin kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, kelestarian sosial budaya dan keharmonisan hubungan kota dan desa.

2. Persyaratan Kawasan Agropolitan

Suatu wilayah dapat dikembangkan menjadi suatu Kawasan Agropolitan bila dapat memenuhi persyaratan berikut:

- a. Memiliki komoditas unggulan;
- b. Memiliki komoditas diversifikasi tropika;
- c. Memiliki area pengembangan komoditas unggulan dan diversifikasi (*hinterland*) dengan skala ekonomi menengah;
- d. Memiliki satu atau lebih desa pusat pertumbuhan agribisnis (kota tani);
- e. Jumlah penduduk di kawasan agropolitan minimal 75.000-225.000 atau 15.000-45.000 KK (1 kota tani);
- f. Memiliki teknologi dan kelembagaan teknologi tepat guna, yang dapat dikembangkan untuk agribisnis;
- g. Memiliki sarana dan prasarana agribisnis yang dapat dikembangkan untuk agribisnis;
- h. Merupakan kawasan yang mencakup desa-desa dengan tipologi minimal swasembada.

3. Kriteria Komponen Utama Pembentuk Kawasan Agropolitan

- a. Kawasan Sentra Produksi Komoditas (KSPK)

Merupakan dusun atau lembaga dusun, desa atau beberapa desa atau lokasi budidaya (*on farm*) dengan kriteria:

Tergantung pada Daerah Pusat Pertumbuhan Agribisnis (DPPA)

- Meliputi kawasan dengan jumlah penduduk 5000-15000 jiwa atau 1000-3000 KK, setengah jam perjalanan sepeda motor ke kota tani utama;
- Memiliki komoditas unggulan;
- Memiliki potensi lahan budidaya dengan agroekologi yang sesuai dengan komoditas unggulan;
- Kegiatan ekonomi utama adalah budidaya pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan atau perikanan);
- Memiliki fasilitas penyimpanan dengan kapasitas tertentu sesuai dengan volume produksi yang dihasilkan;
- Memiliki kegiatan industri rumah tangga (*home industry*) dengan bahan baku komoditas unggulan;
- Memiliki pasar pengumpul komoditas unggulan;
- Memiliki infrastruktur dan suprastruktur dengan norma dan standar perdesaan;
- Memiliki radius 2-5 km.

b. Kota Tani (KT) 1956

Merupakan dusun atau beberapa dusun, desa atau beberapa desa, kota kecamatan atau lokasi strategis dengan kriteria:

- Merupakan daerah Pusat Pertumbuhan Agribisnis (DPPA);
- Meliputi kawasan dengan jumlah penduduk 15000-75000 jiwa atau 3000-15000 KK, seperempat jam perjalanan sepeda motor ke Kota Tani Utama (minimal terdiri dari 3 KSPK);

- Memiliki beberapa komoditas unggulan sesuai dengan KSPK pendukungnya;
- Kegiatan ekonomi utama adalah budidaya pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan atau perikanan) dan jasa pelayanan agribisnis;
- Memiliki kegiatan agroindustri kecil dan menengah dengan bahan baku komoditas-komoditas unggulan dari KSP pendukungnya;
- Memiliki potensi lahan budidaya dengan agroekologi yang sesuai dengan komoditas unggulan serta memiliki area pelayanan kegiatan agribisnis;
- Memiliki pasar komoditas unggulan KSP pendukungnya;
- Memiliki infrastruktur dan suprastruktur dengan norma dan standar perkotaan;
- Memiliki fasilitas penyimpanan dengan kapasitas tertentu sesuai dengan volume produksi pada KSP-KSP pendukungnya;
- Memiliki pasar Grosir ke luar kawasan agribisnis;
- Memiliki Lembaga Swadaya Masyarakat Agribisnis;
- Memiliki radius pelayanan sampai dengan 10-15 km.

c. Kota Tani Utama (KTU)

Merupakan desa atau beberapa desa, dalam kecamatan, Kota kecamatan atau lokasi strategis dengan kriteria:

- Merupakan Daerah Pusat Pertumbuhan Agribisnis (DPPA);
- Meliputi kawasan dengan jumlah penduduk 75000 – 225000 jiwa atau 5000 – 45000 KK;

- Memiliki beberapa komoditas unggulan sesuai dengan kota tani pendukungnya;
- Memiliki fasilitas penyimpanan dengan kapasitas tertentu sesuai dengan volume produksi pada KSP-KSP di setiap kota tani pendukungnya;
- Memiliki infrastruktur dan suprastruktur dengan norma dan standar perkotaan;
- Memiliki Pasar Grosir ke luar daerah kabupaten/kota;
- Memiliki kegiatan agroindustri menengah dan besar dengan bahan baku komoditas-komoditas unggulan dari KSP-KSP di setiap kota tani pendukungnya;
- Memiliki *trading House* dan *Work Shop* Agribisnis;
- Memiliki Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Penyuluhan Teknologi Farming (LP3TF);
- Memiliki Forum Pengembangan Kawasan;
- Memiliki Lembaga Keuangan Agribisnis;
- Memiliki Lembaga Swadaya Masyarakat Agribisnis;
- Memiliki radius pelayanan sampai dengan 15-35 km

4. Pendekatan Agropolitan dan agribisnis dalam Pembangunan Sektor Pertanian

Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan peran sektor perekonomian dalam ekonomi daerah dilakukan dengan dua (2) pendekatan yang *strategic, integrative* dan sinergis.

Pertama, pembangunan pertanian dilakukan dengan pendekatan agribisnis dan terkait erat dengan industrialisasi pertanian dalam bentuk pembangunan agroindustri. Pembangunan agribisnis terdiri atas empat (4) sub sistem: yakni agribisnis hulu (*upstream*) – budidaya (*on farm*) – hilir (*downstream*)- layanan pendukung (*support sistem institution*).

Motor penggerak agribisnis adalah sub sistem hilir/ *down stream* (agroindustri) bukan pada sub sistem *on farm*. Pembangunan agroindustri bertumpu pada produksi bahan baku unggulan pertanian (dan perdesaan). Strategi tersebut dilaksanakan dengan asumsi pembangunan agribisnis/agroindustri: 1. Merupakan kelanjutan strategi pembangunan sektor pertanian yang telah diimplementasikan sebelumnya. 2. Pendekatan agribisnis/ agroindustri dan tata ruangnya berorientasi pada sistem peningkatan produksi berbasis sumber daya hayati (*farming sistem production*) dan pada permintaan pasar (*market oriented*). 3. Merupakan kegiatan ekonomi yang menjadi tumpuan sebagian besar rakyat. 4. Mampu mengakomodasi dan memberdayakan *stakeholders* dan 5. Adanya keterkaitan antara kinerja gatra ekonomi makro dan mikro. Pelaksanaan peningkatan peran sektor pertanian dengan mengintegrasikan pendekatan agribisnis dan agropolitan dapat sinergi apabila dalam kegiatan agribisnis dilakukan dengan mempererat kaitan antara sub sistem agribisnis hulu dengan sub sistem agribisnis hilir (*forward and backward linkage*). Semakin erat kaitan maka kegiatan agribisnis regional akan semakin efisien dan efektif. Lokasi agribisnis atau kawasan agropolitan akan berkembang dengan karakter sebagai sebuah perusahaan daerah yang dimiliki oleh masyarakatnya dengan daya saing yang laten.

Kedua, pembangunan pertanian dilakukan dengan pendekatan wilayah. Pendekatan tersebut berdasarkan keadaan sumberdaya fisik wilayah yang beragam, sehingga tidak semua bagian wilayah memiliki potensi yang sama. Pendekatan wilayah menunjuk perlunya pengembangan sistem dan usaha agribisnis diwujudkan dalam bentuk pusat-pusat pertumbuhan (*agropolitan district*). Agribisnis sebagai suatu kegiatan ekonomi perlu dikaitkan dengan ekonomi regional sehingga secara bertahap

dapat terintegrasi dengan perekonomian nasional maupun internasional. Sampai saat ini pemerintah telah mencanangkan dan mengimplementasikan pendekatan wilayah terhadap beberapa pembangunan sektor pertanian antara lain: Kawasan Sentra Produksi (KSP), Kawasan Agroindustri Terpadu (KAT), Sentra Produksi Agroindustri Komoditas Unggulan (SPAKU), Kawasan Agropolitan (KA) dan pengembangan wilayah lainnya.

Peningkatan peran sektor pertanian dalam pembangunan dilaksanakan dengan mengintegrasikan pendekatan agribisnis dan wilayah. Kawasan agropolitan sebagai wadah kegiatan agribisnis diorientasikan sebagai suatu sistem kawasan fungsional (*forward and backward factor*).

Semakin erat kaitan *backward-forward*, maka kegiatan agribisnis daerah akan semakin efisien dan efektif. Untuk itu perlu dilakukan pendekatan agribisnis yang terintegrasi vertikal dan horizontal serta pendekatan keterkaitan desa-kota (*rural-urban linkage*). Studi di Kanada dan Amerika serta implementasi pendekatan tersebut di Asia (Phillipine dan Thailand) membuktikan keberhasilan pembangunan sektor pertanian. Hal tersebut disebabkan terjadinya integrasi dan sinergi pengembangan agribisnis. Dilaporkan bahwa pengembangan kawasan agropolitan terbukti mampu mendorong daya saing produk unggulan setempat serta stabilitas harga ditingkat petani.

5. Kebijakan Pengembangan Pada Agropolitan Nasional

Perumusan substansi rencana tindak program Repetada masih mencerminkan rumusan rencana tindak sub sistem secara parsial. Akibatnya *stakeholders* juga melakukan kegiatan secara parsial. Motor penggerak pengembangan agribisnis masih pada subsistem *on farm* belum mengarah pada *downstream* agribisnis

yang memberikan nilai tambah yang tinggi sehingga dapat menarik subsistem lainnya dengan nilai tambah yang besar.

Institusi pengembangan agribisnis dan wilayah kebijakannya masih secara parsial atau sektoral. Beberapa kebijakan direncanakan oleh masing-masing sektor dan pelaksanaannya dikoordinir oleh suatu institusi khusus, namun implementasi dan evaluasinya dilakukan secara parsial atau sektoral. Hal tersebut juga terjadi dalam kegiatan subsektor. Manajemen sektoral akan menimbulkan inefisiensi dan inkonsistensi antar subsektor sehingga kelompok sasaran dan *stakeholders* tidak optimal mendayagunakan sumberdaya.

Manajemen agribisnis terintegrasi vertikal memprioritaskan agroindustri sebagai penggerak. Sedangkan sinergi kinerja diperoleh baik pada dimensi lintas sektor, lintas kegiatan juga lintas wilayah. Sistem produksi (pada tingkat *on farm*) sebaiknya dilakukan integrasi vertikal maupun horizontal. Kebijakan penerapan teknologi farming perlu diintensifkan dan dikaji secara terus menerus sehingga diperoleh pola produksi yang menjaga kelestarian namun memiliki efisiensi ekonomi dan biologis (*sustainable*).

Pembuatan rencana tindak (*action plan*) program agroindustri dirumuskan dengan menggunakan pendekatan sistem, sehingga implementasinya akan menghasilkan pengembangan sistem. Kebijakan pengembangan agribisnis pada tingkat regional perlu memprioritaskan pengembangan agroindustri kabupaten/kota yang potensial bahan baku tergayut. Prioritas pada sub sistem sistem hilir (*downstream*) agribisnis akan memecahkan masalah pembangunan sektor pertanian dalam arti luas. Hal tersebut disebabkan terserapnya hasil produksi petani dengan harga yang terkendali dan bijak. Simpul

sistem agribisnis yaitu agroindustri telah dan sedang serta terus menerus perlu mendapat perhatian pemerintah baik dalam fasilitas fisik, infrastruktur, suprastruktur, informasi, teknologi maupun gatra-gatra pemasaran.

F. Pendekatan Agroindustri Produk Terdiversifikasi Vertikal

1. Tujuan Agroindustri

Agroindustri dimaksudkan untuk menangani komoditi unggulan lokal atas pertimbangan potensi daerah dan prospek pemasarannya pada periode perencanaan tertentu. Sedangkan tujuannya adalah :

- a. Meningkatkan nilai tambah hasil panen perdesaan, baik untuk konsumsi langsung maupun untuk bahan baku agroindustri menengah;
- b. Memberikan jaminan mutu dan harga sehingga terjadi efisiensi agribisnis;
- c. Mengembangkan diversifikasi produk sebagai upaya penanggulangan kelebihan produk sebagai upaya penanggulangan kelebihan produksi atau kelangkaan permintaan pada periode tertentu;
- d. Sebagai wahana pengenalan, penguasaan dan sekaligus sebagai wahana peran serta masyarakat dalam sistem agribisnis.

Salah satu pendekatan agroindustri adalah pendekatan produk diversifikasi vertikal, yaitu pengembangan jenis industri komoditas menjadi berbagai macam produk. Sebagai contoh dari pendekatan diversifikasi vertikal adalah komoditas nanas menjadi nanas buah, nanas kaleng (*cocktail*), nanas obat, jam nanas dan *Nata de Pina*.

2. Arah pengembangan Agroindustri

- a. Pengembangan agroindustri rumah tangga/kecil lebih diarahkan untuk:
 - Meningkatkan nilai tambah hasil panen di perdesaan;
 - Meningkatkan mutu dan kuantitas produksi sesuai dengan kebutuhan pasar domestik;
 - Mendorong agroindustri di perdesaan (rumah tangga/kecil) untuk tumbuh menjadi agroindustri menengah dalam wadah koperasi agroindustri;
 - Mendukung agroindustri menengah/besar untuk mengantisipasi perkembangan pasar global akan penawaran dan permintaan;
 - Sebagai wahana dalam alih teknologi dan penerapan teknologi nasional serta wahana pemantapan struktur industri nasional.
- b. Agroindustri skala menengah/besar lebih diarahkan untuk kebutuhan ekspor
 - Meningkatkan daya saing produk guna penetrasi pasar global;
 - Perbaiki mutu produksi yang sejalan dengan globalisasi perdagangan;
 - Mendorong penyebaran agroindustri menengah dan kecil ke berbagai daerah yang prospektif;
 - Meningkatkan produktivitas dan efisiensi agroindustri nasional;
 - Pengembangan iklim usaha yang kondusif dan atraktif guna menarik minat investor nasional maupun asing di bidang agroindustri.

3. Pendekatan Kelembagaan

Kelembagaan merupakan suatu alat penunjang pengembangan, pembinaan, pendampingan dan pembiayaan yang diperlukan untuk pengembangan agropolitan. Dalam rangka membangun kelembagaan sebagai sub sistem penunjang agribisnis, maka di Kawasan Agropolitan perlu didorong, dibutuhkan lembaga swadaya masyarakat, sehingga fasilitas umum dapat dibangun berdasarkan kemampuan anggaran belanja daerah ditambah dengan swadaya masyarakat. Perlu dikemukakan bahwa partisipasi aktif LSM dalam pemeliharaan fasilitas serta pemanfaatan fasilitas sangat penting dalam mewujudkan konsep pembangunan partisipatif (*bottom up*). Lembaga swadaya masyarakat tersebut dapat berbentuk kelompok tani, kelompok usaha bersama, koperasi, asosiasi petani komoditas, himpunan kerukunan tani.

4. Pendekatan Kemitraan

Pendekatan kemitraan merupakan suatu pendekatan untuk mengembangkan pelaku-pelaku atau *stakeholders* yang berkaitan dengan agribisnis. Kemitraan dalam pengembangan agropolitan akan berkaitan dengan pihak-pihak yang terkait, antara lain: swasta, masyarakat maupun pemerintah sendiri. Bentuk kegiatan kemitraan dapat dikembangkan melalui pola Bapak angkat, PIR (Perkebunan Inti Rakyat), Kontrak farming, PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat), perusahaan pengelola, dan lain sebagainya. Namun demikian kemitraan di KAR perlu advokasi dari institusi Intermediate seperti asosiasi komoditas, KADIN, HKTI yang mengendalikan *deadline* bisnis dengan suatu bentuk kesepakatan kemitraan yang lebih berpihak kepada petani.

Manajemen pengelolaan agribisnis pada kawasan agropolitan membutuhkan forum pengembangan dan pengusaha kawasan. Forum tersebut sebagai organisasi harus menyertakan seluruh *stakeholders*. Kesertaan seluruh *stakeholders* akan memiliki efisiensi dan efektifitas manajerial yang tinggi sehingga mampu menekan konflik kepentingan yang tidak perlu (ego sektor, ego subsektor, ego daerah maupun ego wilayah) serta mempercepat proses pemberdayaan sumberdaya manusia, ekonomi dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan.

Subsistem penunjang yang bersifat fisik dan fiskal telah lama diperkenalkan kepada para petani. Jaringan irigasi telah banyak dibangun yang mampu mengairi jutaan hektar sawah dan lahan pertanian lainnya, untuk meningkatkan produksi pertanian. Demikian juga fasilitas kredit pertanian telah lama diterapkan untuk meningkatkan produksi dan pemasaran berbagai komoditi pertanian. Meskipun sudah banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengembangkan agribisnis, tetapi masih terdapat berbagai kendala, terutama dalam menjaga kualitas produk yang memenuhi standar pasar internasional serta kontinuitas produksi sesuai dengan permintaan pasar maupun untuk mampu mendukung suatu industri dari produk pertanian. Salah satu alternatif untuk menjaga kontinuitas dari kualitas produk adalah dengan mengembangkan kegiatan agribisnis disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan kekuatan pasarnya.

Potensi sumber daya alam tersebut tersebar tidak merata pada setiap pulau/wilayah/daerah. Oleh sebab itu pengembangannya perlu dikaitkan dengan pengembangan wilayah nasional dan regional maupun lokal, yang berpedoman kepada rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN) dan

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang telah mengidentifikasi kawasan andalan dan kawasan prioritas pengembangan serta jenis pengembangannya.

Pengembangan agropolitan sangat diperlukan dalam mendukung agribisnis, yang dimasa mendatang berperan sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Agropolitan perlu diposisikan secara sinergis dalam sistem pengembangan wilayah. Implementasi konsep agropolitan dalam pengembangan wilayah dilakukan melalui penerapan sistem pemukiman kota dan perdesaan serta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) yang terkait dengan kawasan budidaya dan sistem transportasi.

G. Dasar Hukum Pengembangan Agropolitan

Beberapa produk Hukum Nasional, dapat digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Tata Ruang Agropolitan:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang pedoman perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1996 tentang pelaksanaan hak dan kewajiban, bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang;
- c. Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah;
- e. Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah;

- f. Undang-undang nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)
- g. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 144/OT.210/AV/2002 tentang Pengembangan Kawasan Agropolitan

H. Tujuan, Sasaran dan Manfaat Pengembangan Agropolitan

1. Tujuan

Tujuan pengembangan kawasan agropolitan adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong perkembangan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan (tidak merusak lingkungan dan terdesentralisasi wewenang berada di pemerintah daerah dan masyarakat) di kawasan agropolitan. Dengan berkembangnya sistem dan usaha agribisnis maka di kawasan agropolitan tersebut tidak saja membangun usaha budidaya saja tetapi membangun usaha agribisnis (pengadaan sarana pertanian), agribisnis (pengelolaan hasil pertanian dan pemasaran) dan jasa penunjangnya, sehingga akan mengurangi kesenjangan pendapatan antara kota dan desa dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat, mengurangi kemiskinan dan mencegah terjadinya urbanisasi tenaga produktif, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari penjelasan di atas, tujuan pengembangan agropolitan yang terdiri dari beberapa dimensi dapat dikelompokkan secara umum menjadi tujuan bagi pengembangan perekonomian, pengembangan daya saing, pengembangan usaha pertanian (agribisnis); dan pengembangan wilayah dan antar wilayah.

a. Tujuan bagi peningkatan perekonomian.

- Menjadikan agribisnis sebagai tulang punggung perekonomian yang melibatkan swasta, masyarakat dan kemitraan antara keduanya;
- Meratakan hasil pembangunan agribisnis dan optimalisasi manfaat aktivitas agribisnis bagi masyarakat dan pemerintah;
- Membentuk pola pemanfaatan SDA yang berkelanjutan;
- Meningkatkan akses agribisnis;

b. Tujuan bagi peningkatan daya saing

- Meningkatkan daya saing agribisnis, berlandaskan keunggulan komparatif wilayah dan SDM;
- Meningkatkan produktivitas agribisnis KSP (*hinterland*);
- Meningkatkan profesionalisme dan kualitas SDM agribisnis yang terbuka;
- Meningkatkan kualitas produksi agribisnis KSP (*hinterland*);
- Meningkatkan nilai tambah produksi agribisnis (produksi primer menjadi produksi sekunder melalui proses agroindustri);
- Meningkatkan jaringan pemasaran produk agribisnis.

c. Tujuan bagi pengembangan agribisnis

- Membentuk pola agribisnis terintegrasi vertikal;
- Membentuk pola produk terdiversifikasi vertikal;
- Memperluas penerapan sistem produksi farming;
- Meningkatkan *backward* dan *forward linkage* agribisnis;
- Meningkatkan penguasaan teknologi produksi *on farm* maupun *off farm*;

- Memberdayakan pengusaha agribisnis kecil dan menengah;
- Meningkatkan manajemen pemasaran pengusaha agribisnis.

d. Tujuan bagi pengembangan wilayah

- Membentuk sistem interaksi desa-kota (*rural-urban linkage*) melalui kegiatan agribisnis dan desain tata ruang beserta sarana-prasarana dasar;
- Membentuk sistem kawasan agropolitan yang terbuka.

2. Sasaran

Sasaran pengembangan kawasan agropolitan adalah pengembangan kawasan pertanian yang berpotensi menjadi kawasan agropolitan, melalui:

- a. Diperolehnya peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana sehingga mampu meningkatkan produksi dan daya saing kawasan tanpa meninggalkan konsep kelestarian;
- b. Diperolehnya peningkatan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia agribisnis di kawasan agropolitan;
- c. Terwujudnya kelembagaan sosial ekonomi agribisnis di kawasan agropolitan (penyedia agro input, pengolahan hasil, pemasaran dan penyedia jasa);
- d. Diperolehnya penguasaan dan peningkatan teknologi agribisnis *on farm* maupun *off farm* sehingga terjadi peningkatan efisiensi dan efektifitas kinerja kawasan agropolitan;
- e. Terbentuknya lembaga penelitian pengkajian dan pelatihan teknologi farming di kawasan agropolitan;

- f. Tertariknya investasi dari dalam maupun luar kawasan dalam kegiatan agribisnis;
- g. Terwujudnya struktur tata ruang dan pemanfaatan lahan kawasan agropolitan yang mampu meningkatkan efisien dan efektivitas kinerja agribisnis;
- h. Terwujudnya peningkatan sarana prasarana agribisnis di kawasan agropolitan (meliputi: jaringan jalan termasuk jalan usaha tani irigasi, pasar, air bersih, pemanfaatan air limbah, dan sampah);
- i. Peningkatan sarana prasarana kesejahteraan sosial meliputi: pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan sarana prasarana umum lainnya seperti listrik, air bersih, telekomunikasi dan lain sebagainya;
- j. Peningkatan keberadaan dan kinerja lembaga permodalan agribisnis, asosiasi agribisnis, model transportasi dan suprastruktur lain yang dibutuhkan kawasan agropolitan;
- k. Terciptanya pasar dan meningkatnya kinerja pemasaran agribisnis di kawasan agropolitan;
- l. Terbentuknya forum pengembangan kawasan agropolitan (beranggotakan unsur pemerintah, pelaku agribisnis, investor dan *stakeholder* lainnya).

3. Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari pengembangan agropolitan, khususnya penyusunan *master plan* agropolitan:

- a. Tercapainya keselarasan dan sinergitas rencana pengembangan pusat-pusat pertumbuhan agribisnis dengan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA), Rencana Strategis Pembangunan Daerah (RENSTRADA) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten;

- b. Tersedianya *master plan* yang berfungsi sebagai rencana induk pengembangan kawasan agropolitan;
- c. Diperolehnya dasar pembuatan keputusan dalam rangka pengembangan pusat-pusat produksi, pusat-pusat pemasaran dan wilayah sistem prasarana (transportasi, sumber daya air bersih, kelistrikan, komunikasi, dan pengairan) di wilayah kabupaten;
- d. Teridentifikasinya sebaran pusat-pusat kegiatan agribisnis (sarana produksi, budidaya, dan perdagangan/pemasaran) di kawasan kabupaten, sehingga dapat digunakan untuk perencanaan yang lebih terperinci.

I. Sistem Kawasan Agropolitan

1. Sub Sistem Kawasan Agropolitan.

Kawasan agropolitan adalah sebuah kawasan dengan 3 sub-sistem utama, yaitu: (1) Sub Sistem kota tani utama: kawasan pelayanan yang dikonsentrasikan mengampu hubungan agribisnis eksternal, (2) Sub Sistem kota tani: kawasan pelayanan agribisnis, dan (3) Sub Sistem *hinterland*: kawasan dimana produksi kefarmingan dilakukan (*on farm*). Dua sub sistem kawasan agropolitan yaitu kota tani utama dan kota tani tersebut memiliki komponen berupa infrastruktur, suprastruktur, serta didukung fasilitator mekanisme sistem (pemerintah, edukator, peneliti, masyarakat). Seperti kawasan perkotaan lain, sub sistem kota tani dan kota tani utama memiliki bagian wilayah kota yang diperuntukkan untuk kawasan pemukiman, kawasan agroindustri dan kawasan penyangga. Sedang di kawasan *hinterland* juga terdapat sub kawasan lindung dan kawasan budidaya. Sistem kawasan agropolitan dapat berjalan lancar ketika didukung oleh

sistem penunjang (lembaga ekonomi petani, lembaga keuangan/perbankan, dan lembaga swadaya masyarakat lainnya).

2. Tipologi kawasan

Kawasan sentra produksi pertanian memiliki tipologi kawasan sesuai klasifikasi sub sektor usaha pertanian dan persyaratan agroklimatnya masing-masing.

3. Infrastruktur

Infrastruktur penunjang diarahkan untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis dalam suatu sistem yang utuh dan menyeluruh pada kawasan agropolitan, yang meliputi:

- a. Dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang subsistem agribisnis (*up stream agribusiness*) untuk menunjang kelancaran aliran barang masuk dari kota ke kawasan agropolitan sebaliknya, berupa bibit, benih, mesin dan peralatan pertanian, pupuk, pestisida, obat/vaksin temak dll. Jenis dukungan sarana dan prasarana dapat berupa:
 - Jalan penghubung antar desa-kota;
 - Gudang penyimpanan saprotan (sarana produksi pertanian);
 - Tempat bongkar muat saprotan.
- b. Dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang subsistem usaha tani/pertanian primer (*on farm agribusiness*) untuk peningkatan produksi usaha budidaya pertanian: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Jenis dukungan sarana dan prasarana dapat berupa:

- Jalan usaha tani (*farm-road*) dari desa pusat ke desa *hinterland* maupun antar desa *hinterland* yang menjadi sarana pemasok saprodi dan pengangkut hasil pertanian;
 - Penyediaan sarana air baku melalui pembuatan sarana irigasi untuk mengairi dan menyirami lahan pertanian;
 - Dermaga, tempat pendaratan kapal penangkap ikan, dan tambatan perahu pada kawasan budidaya perikanan tangkap, baik di danau ataupun di laut;
 - Sub terminal pengumpul pada desa-desa yang menjadi *hinterland*.
- c. Dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung subsistem agribisnis (*down stream agribusiness*) berupa industri-industri pengolahan hasil pertanian sebelum dipasarkan sehingga mendapat nilai tambah. Jenis dukungan sarana dan prasarana dapat berupa:
- Sarana pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - Gudang penyimpanan hasil pertanian, termasuk didalamnya sarana pengawetan.pendinginan (*cold storage*);
 - Sarana pengolahan hasil pertanian seperti: tempat penggilingan, tempat pengemasan, rumah potong hewan, tempat pencucian dan sortir hasil pertanian, sarana industri-industri rumah tangga termasuk *food service* seperti: pembuatan kripik, dodol, jus, bubuk/tepung, produk segar supermarket, aero catering, dan lain-lain;

- Sarana pemasaran dan perdagangan hasil pertanian seperti: pasar tradisional, kios cendramata, pasar hewan, tempat pelelangan ikan, dan terminal agribisnis;
- Terminal, pelataran, tempat parkir serta bongkar muat barang, termasuk sub terminal agribisnis (STA)
- Sarana promosi dan pusat informasi pengembangan agribisnis;
- Sarana kelembagaan dan perekonomian seperti bangunan Koperasi Usaha Bersama (KUB), perbankan, balai pendidikan dan pelatihan agribisnis;
- Jalan antar desa-kota, jalan antar desa, jalan poros desa dan jalan lingkar desa yang menghubungkan beberapa desa *hinterland*.
- Sarana penunjang seperti: pembangkit listrik/generator listrik, telepon, sarana air bersih untuk pembersihan dan pengolahan hasil pertanian, sarana pembuangan limbah industri dan sampah hasil olahan.